

PENDEKATAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEMPROMOSIKAN INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) PADA PELAYANAN KESEHATAN

Monica Ayu Ningrum¹, Samrotul Janah², Zikri Dwi Darmawan³, Maya Puspita Dewi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: monicaayuningrum38@gmail.com

ABSTRACT

The early initiation of breastfeeding (IMD) is universally recognized as the optimal method of infant nutrition and plays a crucial role in promoting both maternal and child health. Early initiation of breastfeeding (IMD)—the practice of beginning breastfeeding within the first hour after birth—has been shown to provide essential health benefits, including boosting the infant’s immune system and fostering bonding between mother and child. The World Health Organization (WHO) and UNICEF emphasize that early initiation is critical for reducing infant mortality and morbidity, improving cognitive development, and preventing diseases such as respiratory infections and diarrhea.

While the benefits of early breastfeeding initiation are well documented, significant barriers remain in its widespread adoption. These barriers are often systemic, ranging from inadequate healthcare infrastructure to cultural and societal attitudes. Public administration, which involves the design and implementation of policies, plays a pivotal role in overcoming these obstacles. This article explores how public administration approaches can promote EBI within healthcare systems, focusing on policy development, healthcare provider training, and public awareness campaigns.

ABSTRAK

Inisiasi dini menyusui (IMD) secara universal diakui sebagai metode nutrisi bayi yang optimal dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Inisiasi awal menyusui (IMD) – praktik memulai menyusui dalam satu jam pertama setelah lahir – telah terbukti memberikan manfaat kesehatan yang penting, termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi dan menumbuhkan ikatan antara ibu dan anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menekankan bahwa inisiasi dini sangat penting untuk mengurangi kematian dan morbiditas bayi, meningkatkan perkembangan kognitif, dan mencegah penyakit seperti infeksi pernapasan dan diare. Sementara manfaat inisiasi menyusui dini didokumentasikan dengan baik, hambatan signifikan tetap ada dalam adopsi yang luas. Hambatan ini seringkali sistemik, mulai dari infrastruktur perawatan kesehatan yang tidak memadai hingga sikap budaya dan sosial. Administrasi publik, yang melibatkan desain dan implementasi kebijakan, memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan ini. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan administrasi publik dapat mempromosikan EBI dalam sistem perawatan kesehatan, dengan fokus pada pengembangan kebijakan, pelatihan penyedia layanan kesehatan, dan kampanye kesadaran publik.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menurunkan prevalensi balita pendek (stunting), salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengimplementasikan kegiatan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). IMD berkontribusi pada pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs), yang kini telah bertransformasi menjadi SDGs, dengan membantu mengurangi kemiskinan, kelaparan, serta angka kematian anak dan balita (Yuriani dkk, 2021).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2021, hanya 52,5 persen atau sekitar setengah dari 2,3 juta bayi yang berusia kurang dari enam bulan di Indonesia yang mendapatkan ASI eksklusif, yang menunjukkan penurunan sebesar 12 persen dibandingkan tahun 2019. Angka inisiasi menyusui dini (IMD) juga mengalami penurunan, dari 58,2 persen pada tahun 2019 menjadi 48,6 persen pada tahun 2021. Implementasi kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 yang mewajibkan tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk melakukan IMD pada bayi baru lahir kepada ibu dalam waktu paling lambat satu jam setelah kelahiran.

Pemberian ASI secara dini dan eksklusif sangat penting untuk kelangsungan hidup anak dan untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit yang bisa berakibat fatal, seperti diare dan pneumonia. Bukti semakin banyak menunjukkan bahwa anak yang menerima ASI memiliki skor kecerdasan yang lebih tinggi, serta memiliki risiko lebih rendah terhadap obesitas, berat badan berlebih, dan diabetes di masa depan. Secara global, peningkatan pemberian ASI dapat menyelamatkan lebih dari 820.000 nyawa anak setiap tahunnya dan mencegah hingga 20.000 kasus kanker payudara pada perempuan (WHO Indonesia, 2022).

Target Organisasi Kesehatan Dunia untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif hingga setidaknya 50% pada tahun 2025, masih ada tantangan berkelanjutan yang harus ditangani (WHO, 2024). Kurangnya pengetahuan dari orang tua, tenaga medis, serta rasa enggan untuk melaksanakan IMD menyebabkan praktik ini masih jarang dilakukan. Banyak orang tua merasa ragu atau tidak percaya bahwa bayi yang baru lahir dapat mencari dan menyusui dari payudara ibunya sendiri. Selain itu, rasa malu untuk meminta bantuan kepada dokter yang menangani persalinan juga menjadi hambatan (Roesli, 2017).

Menurut Boedihardjo (2017), ketidakmampuan menyusui sering kali terkait dengan kurangnya informasi yang diterima ibu terkait menyusui, serta kurangnya rasa percaya diri atau keyakinan akan kemampuan mereka untuk menyusui. Oleh karena itu, keberhasilan pemberian ASI sangat bergantung pada perilaku ibu dalam melaksanakan inisiasi menyusui dini.

UNICEF dan WHO terus mendukung pemerintah dalam melindungi, mempromosikan dan mendukung praktik-praktik menyusui secara optimum dengan berbagi alat dan sumber

daya untuk membantu penerapan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, memperkuat kapasitas pemerintah untuk dapat menyediakan layanan konseling menyusui yang berkualitas dan mengumpulkan bukti untuk mendorong tindakan yang lebih tegas terhadap pemasaran produk pengganti ASI yang tidak tepat. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana mendukung promosi atas Inisiasi Menyusui Dini (IMD) melalui pendekatan administrasi publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu objek yang dibahas dalam penelitian ini tertuju pada satu pembahasan yaitu pendekatan administrasi publik dalam mempromosikan IMD pada layanan kesehatan, selanjutnya penyusunan karya ilmiah ini menggunakan bahasa deskriptif. Sehingga dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk berusaha mendapatkan data sebagai bahan guna membahas permasalahan yang ada, yaitu berupa tulisan atau kuesioner atau dokumen yang didapatkan dari proses wawancara dengan informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Berdasarkan hasil dari 61 responden pada pelaksanaan IMD Kelurahan Muaradua Wilayah Kerja UPT Puskesmas Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu, responden yang tidak melaksanakan IMD adalah sebanyak 40 orang (65,5%) memiliki persentase lebih besar dibanding responden yang melaksanakan IMD yaitu 21 orang (34,4%).

Selanjutnya, diketahui sebanyak 34 responden menyatakan tidak memiliki pengetahuan yang baik terhadap pentingnya pelaksanaan IMD, dan 27 responden menyatakan memiliki pengetahuan yang baik. Hal ini disebabkan pengetahuan responden mengenai pelaksanaan IMD hanya sebatas tahu, dan belum memahami secara mendalam tentang pelaksanaannya.

2. Peran Administrasi Publik dalam Mendorong Inisiasi Menyusui Dini

Peran administrasi publik dalam promosi kesehatan melampaui sekadar perumusan kebijakan; Ini melibatkan koordinasi upaya di berbagai tingkat pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi intervensi kesehatan. Dalam kasus inisiasi menyusui dini, administrator publik bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kebijakan menyusui ke dalam kerangka kerja perawatan kesehatan nasional dan memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara efektif di seluruh fasilitas kesehatan.

a. Pengembangan Kebijakan dan Integrasi Sistem Kesehatan

Pengembangan kebijakan yang efektif adalah landasan untuk mempromosikan inisiasi menyusui dini. Pemerintah ditugaskan untuk membuat kebijakan yang mendukung menyusui dari berbagai sudut, seperti cuti hamil, tempat kerja ramah menyusui, dan penetapan protokol rumah sakit yang mempromosikan EBI. Profesional administrasi publik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan menyusui komprehensif, berbasis bukti, dan selaras dengan rekomendasi kesehatan global.

Misalnya, Inisiatif Rumah Sakit Ramah Bayi (BFHI), yang diluncurkan oleh WHO dan UNICEF, adalah kerangka kebijakan yang dirancang untuk mendukung praktik menyusui di lingkungan perawatan kesehatan. Inisiatif ini mendorong rumah sakit untuk mengadopsi 10 langkah spesifik untuk mendukung menyusui, termasuk memberikan pendidikan kepada ibu dan staf, dan membangun lingkungan yang mendukung untuk menyusui. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan mematuhi protokol ini, menawarkan pelatihan dan pemantauan untuk mempertahankan standar tinggi.

Selain itu, administrasi publik sangat penting dalam mengintegrasikan dukungan menyusui ke dalam sistem perawatan kesehatan nasional. Pejabat kesehatan masyarakat dapat mendorong dimasukkannya pendidikan menyusui dalam pelatihan pra-layanan untuk penyedia layanan kesehatan, memastikan bahwa para profesional seperti perawat, dokter anak, dan bidan diperlengkapi dengan baik untuk mendukung ibu dalam memulai menyusui.

b. Pelatihan dan Dukungan Penyedia Layanan Kesehatan

Salah satu tantangan paling signifikan dalam mempromosikan inisiasi menyusui dini adalah kurangnya pelatihan yang tepat di antara penyedia layanan kesehatan. Dalam

banyak sistem perawatan kesehatan, penyedia mungkin tidak terlatih secara memadai dalam praktik menyusui, yang menyebabkan kurangnya dukungan yang tepat untuk ibu. Administrasi publik dapat mengatasi kesenjangan ini dengan mewajibkan program pelatihan komprehensif untuk staf kesehatan, termasuk dukungan laktasi dan keterampilan konseling.

Selain pelatihan awal, pendidikan berkelanjutan sangat penting. Ketika penelitian baru muncul tentang praktik menyusui, penyedia layanan kesehatan harus tetap mengikuti praktik terbaik. Administrator publik dapat bekerja untuk memastikan bahwa program pelatihan sedang berlangsung, memberikan tenaga kesehatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu ibu memulai menyusui pada jam pertama setelah lahir dan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proses menyusui.

Selain itu, administrasi publik dapat mendukung pembentukan tim multidisiplin yang mencakup konsultan laktasi, dokter anak, dan perawat untuk memberikan dukungan menyusui holistik di rumah sakit. Tim semacam itu sangat penting dalam membantu ibu yang mungkin mengalami kesulitan dengan inisiasi menyusui.

c. Kampanye Kesadaran Publik

Selain pelatihan penyedia layanan kesehatan, administrasi publik memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang menyusui. Banyak ibu mungkin tidak menyadari manfaat inisiasi menyusui dini atau mungkin menghadapi tekanan sosial yang menghalangi menyusui. Kampanye kesadaran publik sangat penting untuk mengubah sikap dan meningkatkan penyerapan praktik menyusui.

Pemerintah dapat merancang kampanye media, berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat inisiasi menyusui dini. Kampanye ini harus bertujuan untuk mendidik ibu hamil dan keluarga mereka, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat umum tentang pentingnya menyusui dan perlunya inisiasi dini.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas

Setelah kebijakan promosi menyusui diterapkan, pemantauan dan evaluasi sangat penting untuk mengukur efektivitasnya dan untuk memastikan kepatuhan. Administrasi publik bertanggung jawab untuk menyiapkan sistem pemantauan yang mengumpulkan data

tentang tingkat inisiasi menyusui, mengidentifikasi hambatan keberhasilan, dan melacak kemajuan inisiatif promosi menyusui.

Dengan menggunakan data untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pemberian layanan, administrator publik dapat membuat penyesuaian yang diperlukan pada program. Misalnya, jika rumah sakit tidak mematuhi standar BFHI, otoritas kesehatan masyarakat dapat turun tangan untuk memberikan pelatihan dan dukungan tambahan. Administrator publik harus meminta pertanggungjawaban penyedia layanan kesehatan, memastikan bahwa kebijakan diikuti, dan para ibu menerima dukungan yang mereka butuhkan.

3. Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Inisiasi Menyusui Dini

Sementara administrasi publik memiliki peran penting dalam mempromosikan inisiasi menyusui dini, beberapa tantangan tetap ada. Ini termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya penyedia layanan kesehatan yang terlatih, resistensi budaya terhadap menyusui, dan kendala ekonomi yang membatasi akses ke layanan dukungan menyusui. Selain itu, sistem perawatan kesehatan di beberapa wilayah mungkin menghadapi kekurangan staf, sehingga sulit untuk menerapkan program menyusui yang komprehensif.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Inisiasi menyusui dini adalah prioritas kesehatan masyarakat yang mendasar, dengan manfaat luas bagi kesehatan ibu dan anak. Administrasi publik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan, program, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mempromosikan menyusui dalam sistem perawatan kesehatan. Melalui pengembangan kebijakan yang komprehensif, pelatihan penyedia layanan kesehatan, kampanye kesadaran publik, dan evaluasi kebijakan dapat menciptakan lingkungan di mana inisiasi menyusui dini didukung dan dinormalisasi.

Meskipun tantangan signifikan tetap ada, upaya kolektif dari pejabat kesehatan masyarakat, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat dapat memastikan bahwa setiap ibu dan anak memiliki akses ke manfaat inisiasi menyusui dini. Dengan investasi

berkelanjutan dalam infrastruktur dan kebijakan kesehatan masyarakat, administrasi publik dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih sehat untuk generasi berikutnya.

Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman ibu tentang pentingnya IMD melalui penyuluhan atau konseling seperti pada saat melakukan kunjungan Ante Natal Care (ANC) ataupun pada saat mengikuti kelas ibu hamil. Proses sosialisasi IMD dapat berupa media brosur atau leaflet untuk memberikan informasi pada ibu melahirkan dan keluarga.

Serta, perlunya meningkatkan kinerja petugas kesehatan dalam pemberian sosialisasi dan adanya sanksi atau reward kepada petugas kesehatan yang melakukan dan yang tidak melakukan IMD, sehingga bisa memotivasi petugas kesehatan lebih serius dalam menjalankan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina Fitriyah, dkk. 2024. Implementasi Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik Dikecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Sungai Karias Dan Desa Tangga Ulin Hulu). Jurnal Pelayanan Publik Vol 1 No 3. Kalimantan Selatan: STIA Amuntai.
- Novy Yuliana. 2022. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini di Kelurahan Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan. Sumatera Selatan: STIKES Al-Ma'arif.
- Roesli, U. 2017. Mengenal ASI Eksklusif. Tribus Agriwidya: Jakarta.
- Roesli, U. 2017. Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif. Pustaka Bunda: Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Indonesia. 2016. Buku Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta.
- World Health Organization (WHO) Indonesia. UNICEF dan WHO menyerukan akses yang setara terhadap dukungan menyusui. 31 Juli 2024.
- World Health Organization (WHO). Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. 20 Desember 2023.
- UNICEF. Pekan Menyusui Sedunia: UNICEF dan WHO serukan dukungan yang lebih besar terhadap pemberian ASI di Indonesia seiring penurunan tingkat menyusui selama pandemi COVID-19. 1 Agustus 2022.